



Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021-2022



**Statistik
Keuangan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
2021-2022**

Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021-2022

Regional Financial Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta 2021-2022

Katalog/Catalogue: 7203007.34

ISSN: 2598-2664

Nomor Publikasi/Publication Number: 34000.2312

Ukuran Buku/Book Size: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: x+74 halaman/pages

Penyusun Naskah/Writer:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Penyunting/Editor:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Pembuat Kover/Cover Designer:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Ilustrasi Kover/Cover Illustration:

Keterangan dalam Bahasa Indonesia/Information in English

Penerbit/Publisher:

©BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Pencetak/Printing:

Sumber Ilustrasi/Illustration Source:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi DI Yogyakarta

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Tim Penyusun

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2021-2022**

Penanggung Jawab Teknis :

Sugeng Arianto, M.Si.

Editor :

1. Amirudin, S.Si, M.MSI.
2. Chatarina Budi Anggarini, S.ST, M.M.

Penulis :

Sudiyana, S.E, M.M.

Pengolah Data :

Sudiyana, S.E, M.M.

Desain/Layout :

Sudiyana, S.E, M.M.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021-2022 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dan APBD 2022 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan publikasi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang lingkup data, konsep, dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini diterangkan dalam bab penjelasan umum, sedangkan realisasi APBD 2021 dan APBD 2022 se-Daerah Istimewa Yogyakarta, baik nominal maupun persentase dijelaskan pada bab ulasan singkat.

Demi perbaikan publikasi di masa mendatang, maka tanggapan dan saran-saran dari pengguna data sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sugeng Arianto, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENJELASAN UMUM	3
1.1. Pendahuluan	3
1.2. Ruang Lingkup	4
1.3. Konsep dan Definisi	4
II. ULASAN RINGKAS	11

Tabel-Tabel

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	12
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	14
3. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2021	15
4. Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022	16
5. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	17
6. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat (TPP) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 ..	18
7. Persentase Realisasi Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016-2021..	19
8. Transfer Pemerintah Pusat (TPP) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022	19
9. Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	20
10. Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022..	21

11. Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	22
12. Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022	23

Lampiran Tabel

1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	27
1.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	28
1.3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	29
1.4. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	30
1.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022	31
1.6. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022	32
1.7. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022	33
1.8. Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022	34
2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021	35
2.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021 (000 Rp)	36
2.3. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021 (000 Rp)	37
2.4. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021	38
2.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022	39
2.6. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2022 ..	40
2.7. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2022	41
2.8. Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2022.....	42
3.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2021	43

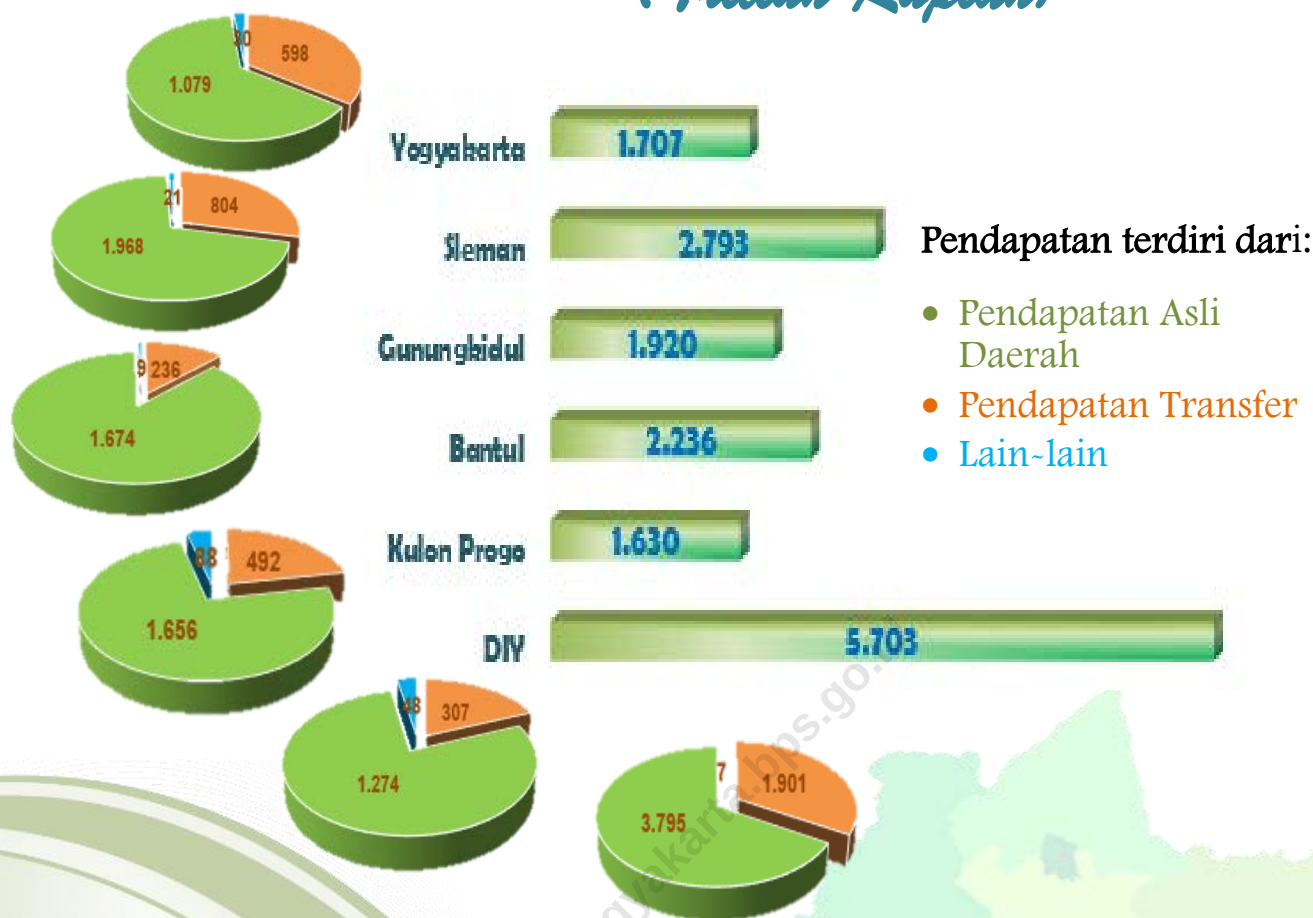
3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2021	44
3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2021	45
3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2021	46
3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2022	47
3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2022	48
3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2022	49
3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2022	50
4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021	51
4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021	52
4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021	53
4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021 ..	54
4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022	55
4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022..	56
4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022	57
4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022	58
5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2021	59
5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2021	60
5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2021	61
5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2021	62
5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022.	63
5.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2022	64
5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2022	65
5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2022.....	66

6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2021	67
6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2021	68
6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2021	69
6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2021	70
6.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2022	71
6.6 Rencana anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2022	72
6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2022	73
6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2022.....	74

Gambar- Gambar

1. Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	15
2. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	21

Realisasi Pendapatan Daerah 2021 (Triliun Rupiah)



I. PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan wilayahnya terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

B. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Konsep dan Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 77 Tahun 2020, terjadi perubahan rincian anggaran baik dari penerimaan maupun pengeluaran.

1. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang terdiri dari:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- 1) **Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

2) Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perizinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

b. Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat; dan transfer antar-daerah. Klasifikasi pendapatan menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

1) Transfer Pemerintah Pusat.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1) Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pendapatan hibah dana BOS, dan pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

ULASAN



II. ULASAN RINGKAS

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Pada Tabel.1 di bawah ini dapat dilihat realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja	Surplus/Defisit (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	5.703.100	5.530.173	1,03	3,03
Kab. Kulon Progo	1.629.730	1.499.994	1,09	7,96
Kab. Bantul	2.235.656	2.226.588	1,00	0,41
Kab. Gunungkidul	1.919.774	1.918.207	1,00	0,08
Kab. Sleman	2.793.328	2.714.313	1,03	2,83
Kota Yogyakarta	1.707.273	1.691.969	1,01	0,90

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta mengalami surplus anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2021 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 memperoleh pendapatan/ penerimaan sebesar 5,703 triliun rupiah dengan total belanja mencapai 5,530 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami surplus keuangan sebesar 172,93 miliar rupiah atau 3,03 persen.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai nilai 2,793 triliun rupiah. Dengan belanja sebesar 2,714 triliun rupiah Kabupaten Sleman mengalami surplus anggaran sebesar 79,02 miliar rupiah. Kabupaten Kulon Progo mempunyai pendapatan paling kecil yaitu sebesar 1,629 triliun, dengan surplus 7,96 persen atau sebesar 129,736 juta rupiah dari total belanja sebesar 1,499 triliun.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya berupa dana perimbangan, juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi, adalah daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berbeda dengan pemerintah provinsi, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, menunjukkan bahwa daerah mampu untuk mencukupi belanja daerah sendiri. Sumbangan PAD terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2021, sebagai berikut:

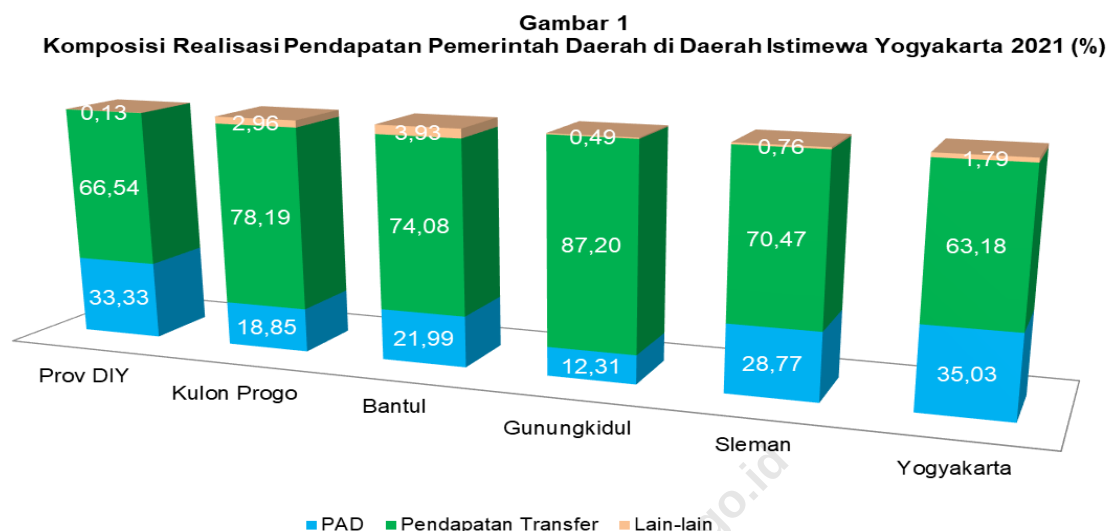
Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Pendapatan (%)	PAD thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.703.100	5.530.173	1.900.923	33,33	34,37
Kab. Kulon Progo	1.629.730	1.499.994	307.154	18,85	20,48
Kab. Bantul	2.235.656	2.226.588	491.671	21,99	22,08
Kab. Gunungkidul	1.919.774	1.918.207	236.371	12,31	12,32
Kab. Sleman	2.793.328	2.714.313	803.679	28,77	29,61
Kota Yogyakarta	1.707.273	1.691.969	598.122	35,03	35,35

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 cukup bervariasi. Dari lima kabupaten/ kota di D.I.Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan kabupaten/kota yang mempunyai persentase PAD terbesar, yaitu mencapai 35,35 persen dari realisasi pendapatannya, disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman dengan 29,61 persen. Kabupaten/kota dengan persentase PAD terhadap pendapatan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul,

yaitu 12,32 persen. Sementara itu persentase PAD Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta cukup besar yaitu mencapai 34,37 persen terhadap realisasi pendapatannya.

Komposisi realisasi pendapatan untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Tabel 3
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2021

Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D.I.Yogyakarta	36,42	37,50	36,54	33,44	33,33	35,45	-0,77
Kab. Kulon Progo	17,52	13,53	14,22	16,08	18,85	16,04	0,33
Kab. Bantul	23,68	20,77	22,29	22,79	21,99	22,30	-0,42
Kab. Gunungkidul	14,69	12,28	12,06	12,73	12,31	12,81	-0,59
Kab. Sleman	31,57	32,97	34,22	31,02	28,77	31,71	-0,70
Kota Yogyakarta	39,62	38,43	39,02	33,13	35,03	37,05	-1,15

Dalam 5 tahun terakhir secara umum terdapat perubahan persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di 5 kabupaten/kota. Rata-rata persentase PAD terhadap total pendapatan terbesar yaitu di Kota Yogyakarta sebesar 37,05 persen, dengan rata-rata perubahan sebesar -1,15 poin, sedangkan rata-rata persentase PAD terhadap realisasi pendapatan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,81 persen, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,59 poin. Sementara untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata persentase PAD terhadap realisasi pendapatan sebesar 35,45 persen, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,77 poin.

Pada tabel 4 di bawah ini, dapat diketahui persentase besarnya rencana pendapatan asli daerah terhadap rencana pendapatan dan rencana belanja, hal ini dilakukan untuk memacu peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Tabel 4
Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Rencana Pendapatan (%)	PAD thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.364.615	5.761.351	2.045.838	38,14	35,51
Kab. Kulon Progo	1.208.435	1.214.554	275.076	22,76	22,65
Kab. Bantul	2.142.809	2.247.414	508.804	23,74	22,64
Kab. Gunungkidul	1.949.363	2.031.940	251.206	12,89	12,36
Kab. Sleman	2.900.014	3.043.565	900.527	31,05	29,59
Kota Yogyakarta	1.705.792	1.794.427	582.332	34,14	32,45

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga akan memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

Tabel 5
Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022

Jenis Pungutan	Pemerintah (%)	Provinsi Bersangkutan (%)	Kabupaten /kota Penghasil (%)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB ¹⁾	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (Iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalti iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan ²⁾	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan :

¹⁾ 9 % untuk biaya pemungutan

²⁾ 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan transfer yang berperan besar dalam keuangan pemerintah daerah adalah adanya Transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Dana Transfer Pemerintah Pusat merupakan upaya Pemerintah Pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dalam rangka membiayai kebutuhan pengeluaran biaya atau memenuhi belanja dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 6
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat (TPP) dan Persentasenya terhadap
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi TPP (Juta Rp.)	TPP thd Pendapatan (%)	TPP thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.703.100	5.530.173	3.794.051	66,53	68,61
Kab. Kulon Progo	1.629.730	1.499.994	1.139.961	69,95	76,00
Kab. Bantul	2.235.656	2.226.588	1.394.235	62,36	62,62
Kab. Gunungkidul	1.919.774	1.918.207	1.519.733	79,16	79,23
Kab. Sleman	2.793.328	2.714.313	1.514.150	54,21	55,78
Kota Yogyakarta	1.707.273	1.691.969	884.851	51,83	52,30

Pada tahun 2021 besarnya Transfer Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3,794 triliun rupiah atau mencapai 66,53 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 68,61 persen dari belanja Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta. Jika dilihat dari besarnya transfer dari Pemerintah Pusat, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja masih rendah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki persentase Transfer Pemerintah Pusat terhadap realisasi pendapatannya terendah adalah Kota Yogyakarta dengan 52,30 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 55,78 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki persentase Transfer Pemerintah Pusat terhadap realisasi pendapatannya tertinggi yaitu mencapai 79,23 persen.

Pada tabel 7 di bawah ini dapat dilihat besarnya persentase Transfer Pemerintah Pusat terhadap pendapatan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Secara umum terjadi kenaikan persentase besarnya Transfer Pemerintah Pusat terhadap pendapatan pemerintah daerah.

Tabel 7
Persentase Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 - 2021

Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Perkem- bangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
D.I. Yogyakarta	46,80	42,57	41,86	42,25	66,53	4,93
Kab. Kulon Progo	66,12	62,41	62,19	68,80	69,95	0,96
Kab. Bantul	61,68	60,84	59,53	60,26	62,36	0,17
Kab. Gunungkidul	67,71	68,81	62,62	68,80	79,16	2,86
Kab. Sleman	51,06	50,45	48,28	50,06	54,21	0,79
Kota Yogyakarta	52,49	49,96	49,57	48,17	51,83	-0,17

Persentase Transfer Pemerintah Pusat terhadap rencana anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 8. Dari tabel di bawah ini bahwa secara umum Transfer Pemerintah Pusat juga semakin kecil dari total belanja yang direncanakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 8
Dana Transfer Pemerintah Pusat (TPP) dan Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana TPP (Juta Rp.)	TPP thd Rencana Pendapa- tan (%)	TPP thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.364.615	5.761.351	3.310.328	61,71	57,46
Kab. Kulon Progo	1.208.435	1.214.554	779.698	64,52	64,20
Kab. Bantul	2.142.809	2.247.414	1.411.033	65,85	62,78
Kab. Gunungkidul	1.949.363	2.031.940	1.539.719	78,99	75,78
Kab. Sleman	2.900.014	3.043.565	1.584.978	54,65	52,08
Kota Yogyakarta	1.679.308	1.773.328	637.956	37,99	35,98

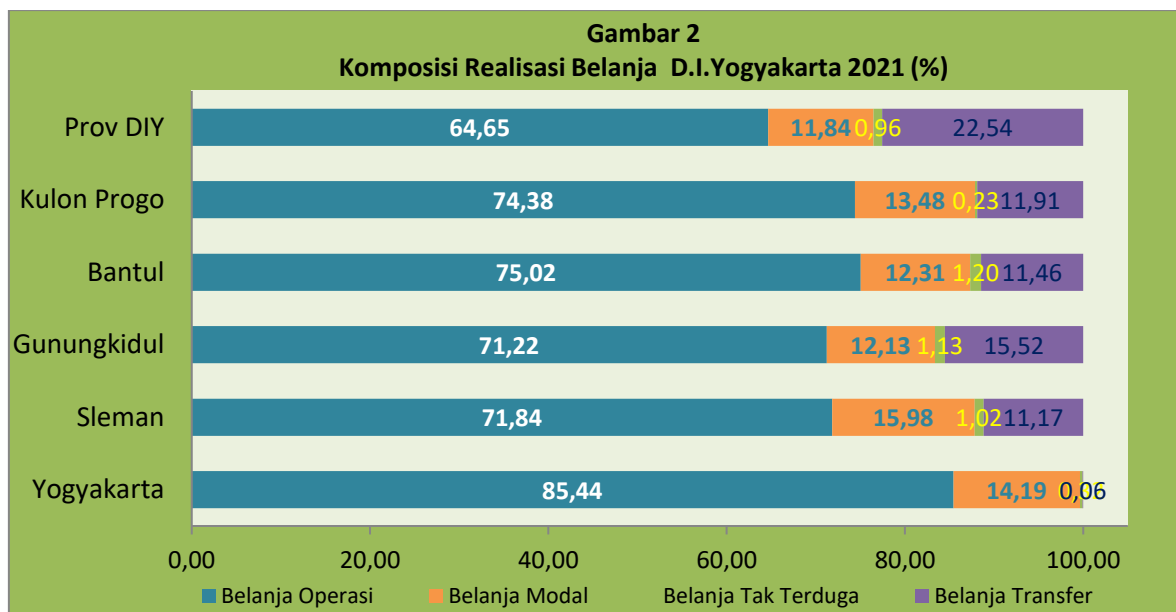
Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Peraturan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah. Urusan pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dibedakan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Sedangkan belanja operasi meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Tabel 9

**Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 (Juta Rp)**

Pemerintah Daerah	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
D.I.Yogyakarta	5.530.173	3.575.258	654.840	53.317	1.246.759
Kab. Kulon Progo	1.499.994	1.115.705	202.257	3.433	178.599
Kab. Bantul	2.226.588	1.670.457	274.195	26.691	255.245
Kab. Gunungkidul	1.918.207	1.366.223	232.706	21.582	297.696
Kab. Sleman	2.714.313	1.949.946	433.650	27.615	303.102
Kota Yogyakarta	1.691.969	1.445.551	240.008	5.351	1.060



Secara umum proporsi realisasi belanja operasi merupakan pos belanja tertinggi dibanding pos belanja lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 9 dan gambar 2 di atas. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta anggaran yang dikeluarkan untuk belanja operasi sebesar 3,575 triliun rupiah atau sebesar 64,65 persen dari total belanja. Kota Yogyakarta mempunyai proporsi belanja operasi paling tinggi dibanding kabupaten/kota lain, yaitu 85,44 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang mempunyai proporsi belanja operasi paling kecil, yaitu 71,22 persen.

Tabel 10
Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 (Juta Rp)

Pemerintah Daerah	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	5.761.351	3.722.283 64,61%	668.954 11,61%	94.764 1,64%	1.275.350 22,14%
Kab. Kulon Progo	1.214.554	955.712 78,69%	71.263 5,87%	21.389 1,76%	166.189 13,68%
Kab. Bantul	2.247.414	1.692.108 75,29%	213.923 9,52%	35.754 1,59%	305.629 13,60%
Kab. Gunungkidul	2.031.940	1.435.430 70,64%	239.867 11,80%	48.338 2,38%	308.304 15,17%
Kab. Sleman	3.043.565	2.200.477 72,30%	464.944 15,28%	52.284 1,72%	325.860 10,71%
Kota Yogyakarta	1.794.427	1.545.925 86,15%	191.348 10,66%	56.325 3,14%	830 0,05%

Pada tabel 10 di atas bias dilihat rencana anggaran untuk masing-masing pos belanja pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021, secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan. Belanja operasi mempunyai nilai terbesar, disusul anggaran transfer, belanja modal, dan anggaran tak terduga.

Pada tabel 11 di bawah ini dapat dilihat bahwa realisasi belanja menurut fungsinya hampir semua Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar mengalokasikan untuk anggaran sektor pendidikan, bisa dilihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduknya. Sektor yang memperoleh anggaran besar selanjutnya adalah sektor pelayanan umum, sektor kesehatan, dan sektor perekonomian.

Tabel 11
Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogya- karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	32,60	61,49	23,92	26,72	25,00	20,07
2. Ketertiban dan Keamanan	1,29	0,17	0,91	1,15	1,28	3,71
3. Ekonomi	6,18	11,32	13,38	5,05	5,45	4,74
4. Lingkungan Hidup	10,12	1,09	1,64	1,12	9,43	7,78
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	1,03	2,10	0,24	5,21	8,51	7,04
6. Kesehatan	4,25	16,01	23,65	19,04	17,84	24,29
7. Pariwisata dan Budaya	9,22	0,26	0,72	2,89	1,42	3,33
8. Pendidikan	33,55	6,65	34,39	36,20	29,60	25,57
9. Perlindungan Sosial	1,77	0,90	1,16	2,61	1,48	3,46
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, sektor kesehatan belum memperoleh porsi anggaran yang tinggi untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan terutama puskesmas masuk dalam anggaran pemerintah kabupaten/kota. Anggaran terbesar untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibelanjakan untuk sektor pendidikan, pelayanan umum, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, dan perumahan dan fasilitas umum.

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2022 mengalami perubahan dibanding realisasi belanja tahun 2021. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing pos belanja dibanding realisasi anggaran tahun 2021. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelayanan umum menjadi pos anggaran terbesar, disusul anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pelayanan umum mempunyai porsi anggaran tertinggi dikarenakan perubahan kelompok belanja, yang didalam pos pelayanan umum ini ada anggaran untuk pendidikan.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta porsi belanja yang paling besar masih pada sektor pelayanan umum, diikuti sektor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Persentase besarnya rencana belanja anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12
Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo*)	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogya- karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	62,87	72,07	64,88	30,12	25,91	24,83
2. Ketertiban dan Keamanan	0,36	0,25	0,30	0,80	1,44	3,78
3. Ekonomi	4,86	5,70	8,65	5,55	6,89	8,58
4. Lingkungan Hidup	3,99	1,82	1,83	1,87	10,48	2,92
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	2,07	0,80	2,19	6,19	8,12	6,50
6. Kesehatan	2,78	10,87	5,04	16,74	15,91	21,13
7. Pariwisata dan Budaya	0,11	0,23	1,05	1,74	1,58	3,34
8. Pendidikan	22,25	6,98	15,33	36,42	27,71	25,71
9. Perlindungan Sosial	0,71	1,29	0,73	0,55	1,94	3,20
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Lampiran Tabel

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	5.703.100.309	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.900.923.075	33,33
1.2	Pendapatan Transfer	3.794.855.661	66,54
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.321.574	0,13
II	Belanja Daerah	5.530.173.462	100,00
2.1	Belanja Operasi	3.575.258.031	64,65
2.2	Belanja Modal	654.839.729	11,84
2.3	Belanja Tak Terduga	53.316.588	0,96
2.4	Belanja Transfer	1.246.759.114	22,54
	Surplus	172.926.848	
	Pembiayaan Netto	381.560.547	

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	1.900.923.075	33,33
1.1	Pajak Daerah	1.688.443.844	29,61
1.2	Retribusi Daerah	38.512.950	0,68
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.338.517	1,69
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.627.764	1,36
II	Pendapatan Transfer	3.794.855.661	66,54
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.794.050.615	66,53
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045	0,01
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.321.574	0,13
3.1	Pendapatan Hibah	7.141.630	0,13
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	179.944	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		5.703.100.309	100,00

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	3.575.258.031	64,65
1.1	Belanja Pegawai	1.561.540.553	28,24
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.039.417.893	18,80
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	73.315.382	1,33
1.5	Belanja Hibah	878.407.044	15,88
1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.577.160	0,41
II	Belanja Modal	654.839.729	11,84
2.1	Belanja Modal Tanah	185.263.843	3,35
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.066.732	2,77
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.855.285	1,21
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	214.309.752	3,88
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.344.117	0,64
III	Belanja tak Terduga	53.316.588	0,96
IV	Belanja Transfer	1.246.759.114	22,54
4.1	Belanja Bagi Hasil	713.118.316	12,90
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	533.640.798	9,65
Jumlah Belanja Daerah		5.530.173.462	100,00

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	1.802.637.323	32,60
2	Ketertiban dan Keamanan	71.384.088	1,29
3	Ekonomi	341.680.281	6,18
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	559.568.317	10,12
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	56.882.054	1,03
6	Kesehatan	235.307.573	4,25
7	Pariwisata	509.654.780	9,22
8	Pendidikan	1.855.261.706	33,55
9	Perlindungan Sosial	97.797.341	1,77
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		5.530.173.462	100,00

Tabel 1.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	5.364.614.635	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.045.838.352	38,14
1.2	Pendapatan Transfer	3.311.199.782	61,72
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.576.500	0,14
II	Belanja Daerah	5.761.351.132	100,00
2.1	Belanja Operasi	3.722.282.846	64,61
2.2	Belanja Modal	668.953.701	11,61
2.3	Belanja Tak Terduga	94.764.495	1,64
2.4	Belanja Transfer	1.275.350.090	22,14
	Surplus	-396.736.498	
	Pembiayaan Netto	396.736.498	

Tabel 1.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	2.045.838.352	38,14
1.1	Pajak Daerah	1.831.695.736	34,14
1.2	Retribusi Daerah	33.049.773	0,62
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	104.889.784	1,96
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.203.059	1,42
II	Pendapatan Transfer	3.311.199.782	61,72
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.310.328.489	61,71
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293	0,02
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.576.500	0,14
3.1	Pendapatan Hibah	7.576.500	0,14
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		5.364.614.635	100,00

Tabel 1.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	3.722.282.846	64,61
1.1	Belanja Pegawai	1.732.843.898	30,08
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.349.690.565	23,43
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	78.451.861	1,36
1.5	Belanja Hibah	530.131.511	9,20
1.6	Belanja Bantuan Sosial	31.165.012	0,54
II	Belanja Modal	668.953.701	11,61
2.1	Belanja Modal Tanah	124.611.548	2,16
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.089.678	2,57
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.388.060	3,79
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.733.333	2,82
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.131.082	0,26
III	Belanja tak Terduga	94.764.495	1,64
IV	Belanja Transfer	1.275.350.090	22,14
4.1	Belanja Bagi Hasil	743.441.355	12,90
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	531.908.735	9,23
Jumlah Belanja Daerah		5.761.351.132	100,00

Tabel 1.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	3.622.115.456	62,87
2	Ketertiban dan Keamanan	20.602.849	0,36
3	Ekonomi	280.260.232	4,86
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	229.906.006	3,99
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	119.042.219	2,07
6	Kesehatan	159.916.457	2,78
7	Pariwisata	6.414.056	0,11
8	Pendidikan	1.282.083.051	22,25
9	Perlindungan Sosial	41.010.807	0,71
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		5.761.351.132	100,00

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.629.730.063	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	307.154.342	18,85
1.2	Pendapatan Transfer	1.274.276.302	78,19
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	48.299.419	2,96
II	Belanja Daerah	1.499.994.322	100,00
2.1	Belanja Operasi	1.115.704.992	74,38
2.2	Belanja Modal	202.257.019	13,48
2.3	Belanja Tak Terduga	3.432.978	0,23
2.4	Belanja Transfer	178.599.333	11,91
Surplus		129.735.741	
Pembiayaan Netto		86.621.955	

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	307.154.342	18,85
1.1	Pajak Daerah	94.479.216	5,80
1.2	Retribusi Daerah	8.137.201	0,50
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.245.310	0,81
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	191.292.615	11,74
II	Pendapatan Transfer	1.274.276.302	78,19
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.139.961.192	69,95
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.315.110	8,24
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	48.299.419	2,96
3.1	Pendapatan Hibah	7.100.000	0,44
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	41.199.419	2,53
Jumlah Pendapatan Daerah		1.629.730.063	100,00

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	1.115.704.992	74,38
1.1	Belanja Pegawai	635.655.346	42,38
1.2	Belanja Barang dan Jasa	391.671.835	26,11
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	74.168.109	4,94
1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.209.702	0,95
II	Belanja Modal	202.257.019	13,48
2.1	Belanja Modal Tanah	398.160	0,03
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.461.918	3,70
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.289.555	2,69
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.514.647	6,83
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.592.739	0,24
III	Belanja tak Terduga	3.432.978	0,23
IV	Belanja Transfer	178.599.333	11,91
4.1	Belanja Bagi Hasil	11.402.009	0,76
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	167.197.324	11,15
Jumlah Belanja Daerah		1.499.994.322	100,00

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	922.329.803	61,49
2	Ketertiban dan Keamanan	2.605.783	0,17
3	Ekonomi	169.851.142	11,32
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	16.345.707	1,09
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	31.514.460	2,10
6	Kesehatan	240.171.516	16,01
7	Pariwisata	3.922.929	0,26
8	Pendidikan	99.732.898	6,65
9	Perlindungan Sosial	13.520.064	0,90
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.499.994.302	100,00

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.208.435.027	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	275.075.551	22,76
1.2	Pendapatan Transfer	926.169.476	76,64
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.190.000	0,59
II	Belanja Daerah	1.214.553.642	100,00
2.1	Belanja Operasi	955.712.404	78,69
2.2	Belanja Modal	71.263.161	5,87
2.3	Belanja Tak Terduga	21.389.082	1,76
2.4	Belanja Transfer	166.188.995	13,68
Surplus		-6.118.615	
Pembiayaan Netto		6.118.615	

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	275.075.551	22,76
1.1	Pajak Daerah	101.084.570	8,36
1.2	Retribusi Daerah	10.217.970	0,85
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.377.095	1,27
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148.395.916	12,28
II	Pendapatan Transfer	926.169.476	76,64
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	779.697.851	64,52
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	146.471.625	12,12
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.190.000	0,59
3.1	Pendapatan Hibah	7.190.000	0,59
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		1.208.435.027	100,00

**Tabel 2.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2022
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	955.712.404	78,69
1.1	Belanja Pegawai	583.840.747	48,07
1.2	Belanja Barang dan Jasa	324.095.804	26,68
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	29.327.175	2,41
1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.448.678	1,52
II	Belanja Modal	71.263.161	5,87
2.1	Belanja Modal Tanah	7.998.297	0,66
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.863.252	0,81
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.892.626	2,21
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.209.154	2,08
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.299.832	0,11
III	Belanja tak Terduga	21.389.082	1,76
IV	Belanja Transfer	166.188.995	13,68
4.1	Belanja Bagi Hasil	11.130.254	0,92
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	155.058.741	12,77
Jumlah Belanja Daerah		1.214.553.642	100,00

Tabel 2.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	875.349.141	72,07
2	Ketertiban dan Keamanan	3.024.488	0,25
3	Ekonomi	69.246.453	5,70
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	22.115.134	1,82
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	9.703.689	0,80
6	Kesehatan	131.992.742	10,87
7	Pariwisata	2.780.342	0,23
8	Pendidikan	84.727.986	6,98
9	Perlindungan Sosial	15.613.667	1,29
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.214.553.642	100,00

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2021
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.235.655.701	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	491.670.724	21,99
1.2	Pendapatan Transfer	1.656.161.604	74,08
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	87.823.373	3,93
II	Belanja Daerah	2.226.588.268	100,00
2.1	Belanja Operasi	1.670.457.247	75,02
2.2	Belanja Modal	274.194.647	12,31
2.3	Belanja Tak Terduga	26.690.979	1,20
2.4	Belanja Transfer	255.245.395	11,46
	Surplus	9.067.434	
	Pembiayaan Netto	231.436.428	

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	491.670.724	21,99
1.1	Pajak Daerah	203.758.211	9,11
1.2	Retribusi Daerah	27.767.870	1,24
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.053.290	0,90
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	240.091.354	10,74
II	Pendapatan Transfer	1.656.161.604	74,08
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.234.561	62,36
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	261.927.044	11,72
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	87.823.373	3,93
3.1	Pendapatan Hibah	6.167.256	0,28
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	81.656.117	3,65
Jumlah Pendapatan Daerah		2.235.655.701	100,00

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	1.670.457.247	75,02
1.1	Belanja Pegawai	894.085.182	40,15
1.2	Belanja Barang dan Jasa	713.169.223	32,03
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	60.212.343	2,70
1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.990.500	0,13
II	Belanja Modal	274.194.647	12,31
2.1	Belanja Modal Tanah	38.174.498	1,71
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.145.841	3,15
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.667.938	1,96
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.699.133	4,97
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.507.238	0,52
III	Belanja tak Terduga	26.690.979	1,20
IV	Belanja Transfer	255.245.395	11,46
4.1	Belanja Bagi Hasil	26.103.398	1,17
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	229.141.997	10,29
Jumlah Belanja Daerah		2.226.588.268	100,00

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	530.542.878	23,92
2	Ketertiban dan Keamanan	29.071.894	0,91
3	Ekonomi	296.677.289	13,38
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	36.333.634	1,64
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	5.253.824	0,24
6	Kesehatan	524.569.522	23,65
7	Pariwisata	15.921.726	0,72
8	Pendidikan	762.553.501	34,39
9	Perlindungan Sosial	25.663.999	1,16
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.226.588.268	100,00

Tabel 3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.142.809.036	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	508.804.008	23,74
1.2	Pendapatan Transfer	1.628.005.027	75,98
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.000.000	0,28
II	Belanja Daerah	2.247.414.065	100,00
2.1	Belanja Operasi	1.692.108.187	75,29
2.2	Belanja Modal	213.922.606	9,52
2.3	Belanja Tak Terduga	35.754.087	1,59
2.4	Belanja Transfer	305.629.184	13,60
	Surplus	-104.605.029	
	Pembiayaan Netto	104.605.029	

Tabel 3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	508.804.008	23,74
1.1	Pajak Daerah	222.088.496	10,36
1.2	Retribusi Daerah	49.639.641	2,32
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.167	1,11
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	213.368.705	9,96
II	Pendapatan Transfer	1.628.005.027	75,98
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.411.033.000	65,85
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	216.972.027	10,13
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.000.000	0,28
3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000	0,28
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		2.142.809.036	100,00

Tabel 3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	1.692.108.187	75,29
1.1	Belanja Pegawai	926.522.668	41,23
1.2	Belanja Barang dan Jasa	684.484.786	30,46
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	69.597.634	3,10
1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.503.100	0,51
II	Belanja Modal	213.922.606	9,52
2.1	Belanja Modal Tanah	8.349.704	0,37
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.373.712	1,71
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.144.983	2,41
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.734.128	4,93
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.320.079	0,10
III	Belanja tak Terduga	35.754.087	1,59
IV	Belanja Transfer	305.629.184	13,60
4.1	Belanja Bagi Hasil	26.103.398	1,16
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	279.525.786	12,44
Jumlah Belanja Daerah		2.247.414.065	100,00

Tabel 3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	1.458.063.491	64,88
2	Ketertiban dan Keamanan	6.684.817	0,30
3	Ekonomi	194.385.574	8,65
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	41.199.793	1,83
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	49.267.506	2,19
6	Kesehatan	113.249.074	5,04
7	Pariwisata	23.594.786	1,05
8	Pendidikan	344.634.124	15,33
9	Perlindungan Sosial	16.334.900	0,73
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.247.414.065	100,00

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.919.774.313	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	236.371.058	12,31
1.2	Pendapatan Transfer	1.674.006.823	87,20
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.396.432	0,49
II	Belanja Daerah	1.918.206.531	100,00
2.1	Belanja Operasi	1.366.223.261	71,22
2.2	Belanja Modal	232.705.666	12,13
2.3	Belanja Tak Terduga	21.581.582	1,13
2.4	Belanja Transfer	297.696.022	15,52
	Surplus	1.567.782	
	Pembiayaan Netto	142.698.344	

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	236.371.058	12,31
1.1	Pajak Daerah	61.453.586	3,20
1.2	Retribusi Daerah	21.303.682	1,11
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.400.975	0,70
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.212.815	7,30
II	Pendapatan Transfer	1.674.006.823	87,20
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.519.733.334	79,16
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	154.273.489	8,04
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.396.432	0,49
3.1	Pendapatan Hibah	4.980.000	0,26
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	4.416.432	0,23
Jumlah Pendapatan Daerah		1.919.774.313	100,00

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	1.366.223.261	71,22
1.1	Belanja Pegawai	808.176.305	42,13
1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.694.503	18,43
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	35.064.596	1,83
1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.287.857	8,83
II	Belanja Modal	232.705.666	12,13
2.1	Belanja Modal Tanah	1.964.907	0,10
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.991.520	4,43
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.729.563	4,36
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.471.521	3,00
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.548.155	0,24
III	Belanja tak Terduga	21.581.582	1,13
IV	Belanja Transfer	297.696.022	15,52
4.1	Belanja Bagi Hasil	9.858.019	0,51
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	287.838.003	15,01
Jumlah Belanja Daerah		1.918.206.531	100,00

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	512.532.348	26,72
2	Ketertiban dan Keamanan	22.106.429	1,15
3	Ekonomi	96.950.636	5,05
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	21.531.921	1,12
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	99.981.199	5,21
6	Kesehatan	365.291.088	19,04
7	Pariwisata	55.379.225	2,89
8	Pendidikan	694.423.976	36,20
9	Perlindungan Sosial	50.009.709	2,61
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.918.206.531	100,00

Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.949.363.019	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	251.205.704	12,89
1.2	Pendapatan Transfer	1.693.157.315	86,86
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.000.000	0,26
II	Belanja Daerah	2.031.939.592	100,00
2.1	Belanja Operasi	1.435.430.482	70,64
2.2	Belanja Modal	239.867.274	11,80
2.3	Belanja Tak Terduga	48.337.621	2,38
2.4	Belanja Transfer	308.304.215	15,17
	Surplus	-82.576.573	
	Pembiayaan Netto	82.576.573	

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	251.205.704	12,89
1.1	Pajak Daerah	60.748.545	3,12
1.2	Retribusi Daerah	36.610.372	1,88
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.217.794	1,04
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.628.993	6,86
II	Pendapatan Transfer	1.693.157.315	86,86
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.539.719.323	78,99
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.437.992	7,87
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.000.000	0,26
3.1	Pendapatan Hibah	5.000.000	0,26
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		1.949.363.019	100,00

**Tabel 4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	1.435.430.482	70,64
1.1	Belanja Pegawai	853.592.515	42,01
1.2	Belanja Barang dan Jasa	517.756.171	25,48
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	250.000	0,01
1.5	Belanja Hibah	46.065.996	2,27
1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.765.800	0,87
II	Belanja Modal	239.867.274	11,80
2.1	Belanja Modal Tanah	2.564.289	0,13
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.347.681	3,61
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.291.451	3,71
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.165.622	4,09
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.498.232	0,27
III	Belanja tak Terduga	48.337.621	2,38
IV	Belanja Transfer	308.304.215	15,17
4.1	Belanja Bagi Hasil	10.903.064	0,54
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	297.401.151	14,64
Jumlah Belanja Daerah		2.031.939.592	100,00

Tabel 4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	612.013.743	30,12
2	Ketertiban dan Keamanan	16.350.758	0,80
3	Ekonomi	112.851.803	5,55
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	37.954.737	1,87
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	125.876.433	6,19
6	Kesehatan	340.210.916	16,74
7	Pariwisata	35.448.883	1,74
8	Pendidikan	740.020.727	36,42
9	Perlindungan Sosial	11.211.595	0,55
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.031.939.592	100,00

**Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2021
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.793.328.385	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	803.679.359	28,77
1.2	Pendapatan Transfer	1.968.377.573	70,47
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	21.271.453	0,76
II	Belanja Daerah	2.714.312.899	100,00
2.1	Belanja Operasi	1.949.946.322	71,84
2.2	Belanja Modal	433.649.906	15,98
2.3	Belanja Tak Terduga	27.614.829	1,02
2.4	Belanja Transfer	303.101.842	11,17
Surplus		79.015.486	
Pembiayaan Netto		366.449.812	

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	803.679.359	28,77
1.1	Pajak Daerah	511.407.257	18,31
1.2	Retribusi Daerah	38.699.707	1,39
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.164.197	1,37
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215.408.198	7,71
II	Pendapatan Transfer	1.968.377.573	70,47
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.514.150.388	54,21
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	454.227.185	16,26
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	21.271.453	0,76
3.1	Pendapatan Hibah	10.920.677	0,39
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	10.350.776	0,37
Jumlah Pendapatan Daerah		2.793.328.385	100,00

Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	1.949.946.322	71,84
1.1	Belanja Pegawai	1.023.352.810	37,70
1.2	Belanja Barang dan Jasa	809.140.794	29,81
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	98.348.313	3,62
1.6	Belanja Bantuan Sosial	19.104.405	0,70
II	Belanja Modal	433.649.906	15,98
2.1	Belanja Modal Tanah	201.823.475	7,44
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.580.505	3,15
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.993.885	1,40
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.031.883	3,72
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.220.158	0,27
III	Belanja tak Terduga	27.614.829	1,02
IV	Belanja Transfer	303.101.842	11,17
4.1	Belanja Bagi Hasil	56.636.670	2,09
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	246.465.172	9,08
Jumlah Belanja Daerah		2.714.312.899	100,00

Tabel 5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	678.577.468	25,00
2	Ketertiban dan Keamanan	34.783.295	1,28
3	Ekonomi	147.823.332	5,45
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	255.881.979	9,43
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	231.094.501	8,51
6	Kesehatan	484.106.302	17,84
7	Pariwisata	38.583.303	1,42
8	Pendidikan	803.356.116	29,60
9	Perlindungan Sosial	40.106.603	1,48
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.714.312.899	100,00

Tabel 5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.900.013.615	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	900.527.254	31,05
1.2	Pendapatan Transfer	1.992.832.259	68,72
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.654.102	0,23
II	Belanja Daerah	3.043.565.118	100,00
2.1	Belanja Operasi	2.200.476.509	72,30
2.2	Belanja Modal	464.944.392	15,28
2.3	Belanja Tak Terduga	52.284.385	1,72
2.4	Belanja Transfer	325.859.832	10,71
	Surplus	-143.551.503	
	Pembiayaan Netto	143.551.503	

**Tabel 5.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2022
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	900.527.254	31,05
1.1	Pajak Daerah	613.400.000	21,15
1.2	Retribusi Daerah	40.779.924	1,41
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.828.762	1,24
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.518.568	7,26
II	Pendapatan Transfer	1.992.832.259	68,72
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.584.977.596	54,65
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	407.854.663	14,06
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.654.102	0,23
3.1	Pendapatan Hibah	6.654.102	0,23
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		2.900.013.615	100,00

Tabel 5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2022 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	2.200.476.509	72,30
1.1	Belanja Pegawai	1.056.596.396	34,72
1.2	Belanja Barang dan Jasa	932.315.769	30,63
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	175.799.244	5,78
1.6	Belanja Bantuan Sosial	35.765.100	1,18
II	Belanja Modal	464.944.392	15,28
2.1	Belanja Modal Tanah	173.529.382	5,70
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.144.313	1,78
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.715.879	3,24
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.314.986	4,35
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.239.832	0,21
III	Belanja tak Terduga	52.284.385	1,72
IV	Belanja Transfer	325.859.832	10,71
4.1	Belanja Bagi Hasil	66.075.849	2,17
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	259.783.983	8,54
Jumlah Belanja Daerah		3.043.565.118	100,00

Tabel 5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	788.535.238	25,91
2	Ketertiban dan Keamanan	43.877.294	1,44
3	Ekonomi	209.836.217	6,89
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	318.989.065	10,48
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	247.259.951	8,12
6	Kesehatan	484.382.577	15,91
7	Pariwisata	48.151.450	1,58
8	Pendidikan	843.499.084	27,71
9	Perlindungan Sosial	59.034.242	1,94
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		3.043.565.118	100,00

**Tabel 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2021
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.707.273.287	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	598.121.885	35,03
1.2	Pendapatan Transfer	1.078.659.260	63,18
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	30.492.142	1,79
II	Belanja Daerah	1.691.968.885	100,00
2.1	Belanja Operasi	1.445.551.076	85,44
2.2	Belanja Modal	240.007.571	14,19
2.3	Belanja Tak Terduga	5.350.720	0,32
2.4	Belanja Transfer	1.059.517	0,06
	Surplus	15.304.402	
	Pembiayaan Netto	313.436.954	

Tabel 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	598.121.885	35,03
1.1	Pajak Daerah	372.462.884	21,82
1.2	Retribusi Daerah	26.855.367	1,57
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.991.239	1,41
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.812.395	10,24
II	Pendapatan Transfer	1.078.659.260	63,18
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	884.851.268	51,83
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	193.807.992	11,35
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	30.492.142	1,79
3.1	Pendapatan Hibah	298.000	0,02
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	30.194.142	1,77
Jumlah Pendapatan Daerah		1.707.273.287	100,00

Tabel 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	1.445.551.076	85,44
1.1	Belanja Pegawai	693.434.146	40,98
1.2	Belanja Barang dan Jasa	675.659.110	39,93
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	44.321.476	2,62
1.6	Belanja Bantuan Sosial	32.136.345	1,90
II	Belanja Modal	240.007.571	14,19
2.1	Belanja Modal Tanah	31.234.103	1,85
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.237.141	3,38
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.693.245	3,11
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.799.299	5,01
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.043.783	0,83
III	Belanja tak Terduga	5.350.720	0,32
IV	Belanja Transfer	1.059.517	0,06
4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0,00
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1.059.517	0,06
Jumlah Belanja Daerah		1.691.968.885	100,00

Tabel 6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2021 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	339.620.714	20,07
2	Ketertiban dan Keamanan	62.837.839	3,71
3	Ekonomi	80.267.741	4,74
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	131.657.054	7,78
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	119.175.683	7,04
6	Kesehatan	411.005.473	24,29
7	Pariwisata	56.356.630	3,33
8	Pendidikan	432.580.930	25,57
9	Perlindungan Sosial	58.466.819	3,46
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.691.968.885	100,00

Tabel 6.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.705.792.285	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	582.331.660	34,14
1.2	Pendapatan Transfer	1.123.460.625	65,86
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0,00
II	Belanja Daerah	1.794.427.167	100,00
2.1	Belanja Operasi	1.545.924.568	86,15
2.2	Belanja Modal	191.347.806	10,66
2.3	Belanja Tak Terduga	56.325.000	3,14
2.4	Belanja Transfer	829.793	0,05
Surplus		-88.634.882	
Pembiayaan Netto		88.634.882	

**Tabel 6.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2022
(000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	582.331.660	34,14
1.1	Pajak Daerah	379.411.600	22,24
1.2	Retribusi Daerah	27.197.285	1,59
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.567.406	1,91
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	143.155.369	8,39
II	Pendapatan Transfer	1.123.460.625	65,86
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	955.463.005	56,01
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	167.997.620	9,85
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0,00
3.1	Pendapatan Hibah	0	0,00
3.2	Pendapatan Darurat	0	0,00
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		1.705.792.285	100,00

Tabel 6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Operasi	1.545.924.568	86,15
1.1	Belanja Pegawai	718.502.675	40,04
1.2	Belanja Barang dan Jasa	729.058.293	40,63
1.3	Belanja Bunga	0	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0	0,00
1.5	Belanja Hibah	81.763.334	4,56
1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.600.265	0,93
II	Belanja Modal	191.347.806	10,66
2.1	Belanja Modal Tanah	0	0,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.506.839	2,87
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.395.770	4,93
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.030.414	2,45
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.414.782	0,41
III	Belanja tak Terduga	56.325.000	3,14
IV	Belanja Transfer	829.793	0,05
4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0,00
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	829.793	0,05
Jumlah Belanja Daerah		1.794.427.167	100,00

Tabel 6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2022 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	445.587.554	24,83
2	Ketertiban dan Keamanan	67.852.102	3,78
3	Ekonomi	154.033.481	8,58
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	52.437.818	2,92
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	116.609.726	6,50
6	Kesehatan	379.118.001	21,13
7	Pariwisata	59.982.813	3,34
8	Pendidikan	461.373.685	25,71
9	Perlindungan Sosial	57.431.986	3,20
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.794.427.167	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan - Bantul
Telp. (0274) 4342234 - Hunting., Fax. (0274) 4342230
E-mail: bps3400@bps.go.id, Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>



9 772598 266007